



Perubahan Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Indonesia Perspektif Historis dan Tantangan Implementasinya

Yuvenalis Peka¹, Elisabet Yohana Indah², Dince Misa³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nusa Cendana

Email : elisabetindah705@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 10, 2025

Revised July 17, 2025

Accepted July 24, 2025

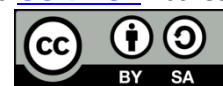
Keywords:

Curriculum Change, Education System, Implementation Challenges

ABSTRACT

Curriculum change is a phenomenon that continues to occur in the Indonesian education system, reflecting social, political, economic dynamics, and global needs. This paper discusses the historical development of the curriculum from the colonial period to the Merdeka Curriculum era, as well as the main challenges in its implementation. This study uses a literature study method to trace the traces of curriculum change and examine the factors that hinder implementation in the field. It was found that curriculum change is often not accompanied by infrastructure readiness, adequate teacher training, and strong community participation. Therefore, a holistic and collaborative approach is needed in designing and implementing the curriculum in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 10, 2025

Revised July 17, 2025

Accepted July 24, 2025

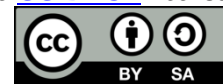
Kata Kunci:

Perubahan Kurikulum, Sistem Pendidikan, Tantangan Implementasi

ABSTRAK

Perubahan kurikulum merupakan fenomena yang terus terjadi dalam sistem pendidikan Indonesia, mencerminkan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan kebutuhan global. Tulisan ini membahas perkembangan kurikulum secara historis dari masa kolonial hingga era Kurikulum Merdeka, serta tantangan utama dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menelusuri jejak perubahan kurikulum serta mengkaji faktor-faktor penghambat implementasi di lapangan. Ditemukan bahwa perubahan kurikulum seringkali tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur, pelatihan guru yang memadai, dan partisipasi masyarakat yang kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif dalam merancang dan menerapkan kurikulum di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Elisabet Yohana Indah

Universitas Nusa Cendana

E-mail: elisabetindah705@gmail.com

PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum merupakan fenomena yang terus berlangsung dalam sistem pendidikan Indonesia. Sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan, kurikulum pendidikan Indonesia telah mengalami berbagai transformasi yang mencerminkan dinamika sosial, politik, ekonomi, serta kebutuhan global yang terus berkembang (Viana, et al. 2024). Kurikulum tidak



hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pembelajaran, tetapi juga sebagai cerminan ideologi bangsa dan visi nasional yang ingin dicapai (Satria,.et al. 2021).

Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai dengan Kurikulum 1947 yang dikenal sebagai Rentjana Pelajaran 1947. Kurikulum ini menandai pergeseran dari sistem pendidikan kolonial Belanda menuju sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada pembentukan karakter bangsa merdeka dengan dasar Pancasila (Audi,.et al. 2024). Fokus utama kurikulum ini adalah pendidikan watak dan kesadaran bernegara, bukan sekadar penguasaan materi akademik semata (Widyandini, 2021). Selanjutnya, Kurikulum 1952 yang dikenal sebagai Rentjana Pelajaran Terurai 1952, memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih terstruktur dengan pengajaran per mata pelajaran oleh guru yang spesifik. Kurikulum ini menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sebagai upaya menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat (Zaeni,.et al. 2024). Kurikulum ini merupakan langkah awal pembentukan sistem pendidikan nasional yang lebih sistematis.

Perubahan kurikulum terus berlanjut seiring dengan perubahan sistem politik dan sosial budaya Indonesia. Setiap pergantian rezim politik seringkali diikuti dengan pembaruan kurikulum yang menyesuaikan dengan paradigma kekuasaan yang berkuasa saat itu. Misalnya, Kurikulum 1975 dan 1984 yang lebih menekankan pada pengembangan tujuan, isi, dan strategi pelaksanaan yang berbeda dari kurikulum sebelumnya.

Kurikulum 1994 dan 2004 merupakan bagian dari upaya modernisasi pendidikan yang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta tuntutan globalisasi (Praekanata,. et al. 2024). Kurikulum 2013 kemudian hadir dengan pendekatan kompetensi yang lebih berpusat pada peserta didik, menandai pergeseran paradigma pembelajaran dari penguasaan materi ke pengembangan kompetensi dan karakter. Namun, perubahan kurikulum di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum sering terkendala oleh ketidaksiapan infrastruktur, kurangnya pelatihan guru yang memadai, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembelajaran. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas transformasi kurikulum di lapangan. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, terutama guru, menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kurikulum baru. Guru yang belum memahami secara mendalam perubahan kurikulum cenderung kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional guru harus menjadi prioritas dalam setiap perubahan kurikulum.

Perkembangan terkini dalam sistem pendidikan Indonesia adalah hadirnya Kurikulum Merdeka yang menawarkan fleksibilitas dan kebebasan lebih besar bagi sekolah dan guru dalam mengelola pembelajaran sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik (Hanif, 2022). Kurikulum ini merupakan respons terhadap tuntutan global dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21 yang dinamis. Namun, tantangan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka tetap sama, yakni kesiapan sistem pendidikan secara menyeluruh, termasuk infrastruktur, pelatihan guru, dan dukungan masyarakat. Pendekatan holistik dan kolaboratif menjadi kunci dalam merancang dan menerapkan kurikulum yang efektif dan berkelanjutan (Rosa,. et al. 2024).

Dengan memahami sejarah panjang perubahan kurikulum dan tantangan yang dihadapi, diharapkan kebijakan pendidikan ke depan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan zaman dan



mampu menciptakan peserta didik yang unggul dan berwawasan global. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menelusuri jejak perubahan kurikulum serta mengkaji faktor penghambat implementasi di lapangan sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan pendidikan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam mengkaji Perubahan Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Indonesia Perspektif Historis dan Tantangan Implementasinya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode dimana pengumpulan data untuk mengakses pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan persoalan yang diangkat. Penelitian bertujuan untuk mengkaji fakta lapangan, keadaan subjek maupun objek yang akan di teliti. Dalam meneliti peneliti menggunakan beberapa teknik ataupun cara: observasi, wawancara, dan kuisioner untuk mendapatkan informasi dari responden, mendokumentasikan proses diskusi di lapangan sebagai bukti penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia merupakan refleksi dari upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan pendidikan dengan dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, perubahan kurikulum tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan yang bersifat struktural, kultural, maupun teknis yang kerap kali menghambat efektivitas implementasi kebijakan pendidikan di lapangan (Tohani, 2020).

Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan kondisi nyata di sekolah-sekolah. Setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi sumber daya manusia, fasilitas, maupun latar belakang sosial-ekonomi peserta didik. Kesenjangan ini membuat tidak semua sekolah mampu menerapkan kurikulum secara optimal dan sesuai dengan yang dirancang di tingkat pusat (Nugroho, 2019).

Selain itu, keterbatasan kompetensi guru juga menjadi hambatan signifikan. Banyak guru belum sepenuhnya memahami pendekatan dan strategi pembelajaran yang diamanatkan dalam kurikulum baru, sehingga proses pembelajaran cenderung kembali pada metode konvensional yang minim inovasi. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis menyebabkan ketidaksiapan guru dalam mengadopsi perubahan kurikulum secara efektif (Setiawan, 2021).

Faktor lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Kurikulum modern seperti Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka menekankan penggunaan teknologi dan pendekatan pembelajaran aktif, namun banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, seperti akses listrik, internet, dan perangkat digital.



Dari sisi budaya belajar, sebagian masyarakat dan orang tua siswa masih berpegang pada pola pikir lama yang mengukur keberhasilan pendidikan hanya dari capaian nilai akademik. Hal ini seringkali berseberangan dengan tujuan kurikulum baru yang lebih menekankan pada pengembangan karakter, kompetensi abad ke-21, dan pembelajaran kontekstual.

Tantangan lainnya berkaitan dengan aspek evaluasi dan pengawasan. Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif menyebabkan pelaksanaan kurikulum tidak terukur secara objektif, sehingga sulit untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat. Secara keseluruhan, implementasi kurikulum di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekolah, guru, serta masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh.

Pembahasan

A. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia

1. Priode Orde Lama (1945 - 1966)

UU No.4 Tahun 1950 menerangkan bahwa warga negara yang susila dan demokratis, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa dan masyarakat; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 menyatakan warga negara yang susila dan demokratis serta bertanggung jawab atas kesejahteraan Masyarakat dan Tanah Air. Melalui Keputusan Presiden No.145 Tahun 1965 menciptakan warga negara sosialisasi yang susila, yang adil, makmur secara spiritual dan material, dan berjiwa pancasila.

2. Orde Baru (1966 - 1998).

TAP MPRS Nomor XXVII (27) Tahun 1966, Pembentukan manusia Pancasila sejati didasarkan pada ketetapan-ketetapan seperti yang dimaksudkan oleh Pembukaan UUD 1945. TAP MPR Nomor IV (4) Tahun 1973, Untuk mewujudkan manusia pembangunan yang berpancasila, orang Indonesia harus sehat secara fisik dan rohani, mempunyai keterampilan dan pengetahuan, bertanggung jawab dan kreatif , menumbuhkan sikap penuh tenggang rasa dan demokratis, memiliki kecerdasan yang tinggi, dan memiliki budi pekerti yang luhur, cinta bangsa dan sesama manusia. UU No. 2 Tahun 1989, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan mengembangkan orang Indonesia seutuhnya, yaitu orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang teguh dan mandiri, dan memiliki tanggung jawab sosial dan nasional.

3. Era Reformasi (1998 - Sekarang)

UU No.20 Tahun 2003 dimaksudkan membangun siswa menjadi warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, berbakat, mandiri, dan demokratis. Kurikulum biasanya disesuaikan dan diperbarui setiap sepuluh tahun. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa Kursi tidak terpengaruh oleh perubahan dalam masyarakat, termasuk kemajuan dalam Ilmu Pengetahuan dan



Teknologi. Kurikulum telah diubah enam kali sejak dibukukan tahun 1968, menurut catatan sejarah pendidikan Indonesia. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1947, 1952, dan 1964. Perubahan berikutnya terjadi setiap sepuluh tahun, pada tahun 1984, 1994, dan 2004. Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2006. Menurut Soekisno (2010).

Kementdikbud mencatat sejarah panjang perkembangan kurikulum di Indonesia yang mencerminkan dinamika kebutuhan pendidikan nasional dari masa ke masa. Perjalanan ini dimulai dari Rencana Pelajaran 1947, lalu kurikulum tahun 1954, 1968, 1973 (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan), 1975, 1984, 1994, 1997 (Revisi Kurikulum 1994), 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Perubahan besar berikutnya terjadi pada Kurikulum 2013 (K-13) yang diterapkan secara bertahap sejak tahun 2013 sebagai penyempurnaan Kurikulum 2006 dengan fokus pada penguatan pendidikan karakter, pendekatan saintifik, integrasi tematik, dan penilaian autentik. Terbaru, Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan tahun 2022 hadir sebagai respons terhadap tantangan global dan kebutuhan belajar pascapandemi, dengan menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, fleksibilitas, penguatan profil pelajar Pancasila, serta memberi keleluasaan bagi guru dan satuan pendidikan dalam merancang proses pembelajaran. Semua perubahan ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional agar sejalan dengan perkembangan zaman dan standar pendidikan global.

B. Perkembangan Kurikulum di Indonesia

1) Kurikulum 1947

Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang diterapkan setelah Indonesia merdeka. Kurikulum ini dikenal dengan istilah (Rencana Pelajaran 1947) dan mulai dilaksanakan secara luas pada tahun 1950 (Amir., et al. 2025). Fokus utama kurikulum ini adalah pembentukan karakter bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan memiliki kesadaran bernegara serta nasionalisme yang kuat. Kurikulum ini menekankan pendidikan watak dan kesadaran sosial-politik, bukan sekadar penguasaan materi akademik (Mustakim, 2011).

Pada masa itu, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang sejajar dengan bangsa lain di dunia, dengan Pancasila sebagai dasar utama pendidikan (Hartono, 2017). Kurikulum ini berusaha menghilangkan warisan pendidikan kolonial yang bersifat diskriminatif dan menggantinya dengan sistem yang mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan dan persatuan bangsa (Sembiring, 2021). Namun, pelaksanaan kurikulum ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan tenaga pengajar yang terlatih. Selain itu, kondisi politik dan sosial yang masih belum stabil pasca kemerdekaan juga mempengaruhi efektivitas implementasi kurikulum ini (Meliza, 2024).

Kurikulum 1947 juga menandai awal dari upaya sistematis untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia. Kurikulum ini menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum berikutnya yang lebih terstruktur dan rinci.



2) Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 muncul pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, yang membawa perubahan signifikan dalam orientasi pendidikan nasional. Kurikulum ini dirancang untuk mendukung pembangunan nasional dan stabilitas politik yang menjadi fokus utama pemerintah saat itu. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat secara jasmani, cerdas, terampil, bermoral, dan beriman. Kurikulum 1968 mengganti program Pancawardhana sebelumnya dengan program "Pembinaan Jiwa Pancasila, Pengetahuan Dasar, dan Kecakapan Khusus" yang menekankan sembilan mata pelajaran pokok (Izmi, 2017).

Mata pelajaran dalam kurikulum ini lebih bersifat teoritis dan sedikit praktik, dengan tujuan memperkuat mental dan moral peserta didik sebagai bagian dari upaya stabilisasi sosial-politik. Namun, pendekatan ini mendapat kritik karena dianggap terlalu kaku dan kurang mencerminkan keragaman budaya Indonesia (Triwiyanto, 2022).

Kurikulum 1968 juga memperkenalkan sistem penjurusan di tingkat sekolah menengah atas (SMA) pada kelas 2, yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan dunia kerja (Mahande, 2023). Meskipun demikian, kurikulum ini menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum selanjutnya, terutama dalam hal penekanan pada nilai-nilai Pancasila dan pembangunan karakter bangsa.

3) Kurikulum 1975 dan 1984

Kurikulum 1975 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1968 dengan menerapkan pendekatan tujuan instruksional. Kurikulum ini menekankan pada perencanaan pembelajaran yang sistematis dan terukur, dengan tujuan yang jelas untuk setiap mata pelajaran (Kaimuddin, 2015). Pendekatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui pengembangan kompetensi yang spesifik dan terukur. Kurikulum 1975 juga memperkenalkan sistem satuan pelajaran yang memudahkan pengelolaan dan evaluasi pembelajaran. Kemudian, Kurikulum 1984 mengembangkan pendekatan proses pembelajaran yang lebih menekankan keaktifan siswa. Kurikulum ini memperkenalkan program yang dapat dipilih sesuai minat dan bakat peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan menarik (Anwar, 2021).

Kurikulum 1984 juga menekankan pengembangan keterampilan hidup dan penguatan karakter melalui kegiatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif. Hal ini merupakan langkah awal menuju pendidikan yang lebih holistik dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh (Pahrudin, 2019). Kedua kurikulum ini menjadi landasan penting dalam reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

4) Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan kurikulum yang mengintegrasikan antar mata pelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran (Alvizar, 2023). Kurikulum ini dirancang untuk mengurangi beban materi sekaligus meningkatkan keterpaduan pengetahuan. Pendekatan integrasi ini bertujuan agar peserta didik dapat melihat keterkaitan antar bidang studi sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan



kontekstual. Kurikulum ini juga menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif.

Selain itu, kurikulum 1994 memperkenalkan sistem evaluasi yang lebih variatif dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Hal ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kompetensi peserta didik (Kristiawan, 2019). Namun, implementasi kurikulum ini menghadapi kendala dalam hal kesiapan guru dan sumber daya pendukung, sehingga dampaknya belum optimal di seluruh wilayah Indonesia. Kurikulum 1994 menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi pendidikan Indonesia yang berorientasi pada pengembangan kompetensi dan keterampilan abad ke-20.

5) Kurikulum 2006 (KTSP)

Menurut Pendidikan, B. S. N., & Indonesia, K. R. (2006). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 memberikan keleluasaan lebih besar kepada sekolah dalam mengembangkan materi ajar sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Kurikulum ini menegaskan peran aktif sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran

KTSP mengedepankan desentralisasi pendidikan dengan memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menentukan silabus dan kalender pendidikan, sehingga pembelajaran lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan masyarakat sekitar (Yulianto, 2015).

Kurikulum ini juga menekankan pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Penilaian dilakukan secara menyeluruh untuk mengukur pencapaian kompetensi tersebut (Ani, 2013). Namun, tantangan utama dalam implementasi KTSP adalah kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Perbedaan kualitas antar sekolah juga menjadi kendala dalam penerapan kurikulum ini secara merata. KTSP menjadi fondasi penting dalam mengimplementasikan pendidikan yang lebih fleksibel dan kontekstual, serta menjadi jembatan menuju kurikulum yang lebih adaptif di masa depan.

6) Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 diperkenalkan dengan pendekatan ilmiah (*scientific approach*) yang menekankan proses pembelajaran yang sistematis mulai dari mengamati, menanya, mencoba, menalar, hingga mengkomunikasikan. Kurikulum ini juga menekankan pendidikan karakter sebagai bagian integral dari pembelajaran (Anwas, 2013).

Pendekatan ini bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik secara holistik, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendidikan karakter yang ditekankan meliputi nilai-nilai Pancasila, religiusitas, nasionalisme, dan integritas.

Kurikulum 2013 juga mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pembelajaran untuk menyesuaikan dengan tuntutan abad ke-21. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pelatihan guru dan keterbatasan sarana teknologi di banyak sekolah (Pebriani, 2025)

Selain itu, perubahan metode pembelajaran yang cukup drastis memerlukan adaptasi yang tidak mudah bagi guru dan peserta didik, sehingga perlu dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat. Kurikulum 2013 menandai upaya besar dalam



reformasi pendidikan Indonesia yang berorientasi pada pengembangan kompetensi abad ke-21 dan karakter bangsa.

7) Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka diperkenalkan pada tahun 2022 sebagai respons terhadap kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel dan kontekstual di era modern. Kurikulum ini memberikan kebebasan lebih besar kepada satuan pendidikan dan guru dalam menyusun pembelajaran sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik (Mubarak, 2022).

Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan pendekatan yang adaptif, kreatif, dan inovatif. Guru diberi keleluasaan dalam memilih materi, metode, dan evaluasi yang sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan sekolah (Ainissyifa, et al. 2024). Pendekatan ini juga menekankan pengembangan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas, serta penguatan pendidikan karakter yang berkelanjutan.

Namun, tantangan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah kesiapan infrastruktur, pelatihan guru yang memadai, dan partisipasi masyarakat yang kuat agar kurikulum ini dapat berjalan efektif dan merata di seluruh Indonesia. Kurikulum Merdeka menjadi tonggak terbaru dalam evolusi kurikulum Indonesia yang berupaya menjawab dinamika sosial, teknologi, dan globalisasi dengan pendekatan yang lebih humanistik dan kontekstual.

C. Tantangan Implementasi Kurikulum

Perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia merupakan refleksi dari upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak selalu mudah dalam pengimplementasian. Meski secara konseptual kurikulum baru menawarkan pendekatan yang lebih relevan dan kontekstual, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural yang belum sepenuhnya teratasi (Tohani, 2020).

Salah satu penyebab utama sulitnya implementasi kurikulum adalah karena adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan kondisi nyata di lapangan. Setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi sumber daya manusia, fasilitas, hingga konteks sosial-budaya. Ketika kurikulum dirancang secara sentralistik tanpa mempertimbangkan variasi kondisi lokal, maka implementasinya berisiko menjadi formalitas, tanpa menyentuh esensi perubahan yang diharapkan (Patandung, 2022).

Selain itu, keberhasilan implementasi kurikulum sangat bergantung pada kesiapan para pelaku pendidikan, terutama guru, kepala sekolah, dan pengawas. Mereka tidak hanya dituntut untuk memahami substansi kurikulum, tetapi juga harus mampu menerjemahkannya ke dalam praktik pembelajaran yang efektif dan bermakna. Sayangnya, banyak di antara mereka masih menghadapi keterbatasan dalam pelatihan, akses informasi, maupun dukungan profesional yang memadai.

1. Kesiapan Guru

Guru adalah aktor utama dalam implementasi kurikulum di lapangan. Tanpa kesiapan dan pemahaman yang memadai, perubahan kurikulum yang dirancang sebaik apa pun tidak akan berdampak signifikan pada proses dan hasil pembelajaran.



Sayangnya, banyak guru yang belum sepenuhnya memahami pendekatan, tujuan, dan filosofi kurikulum baru. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pelatihan atau sosialisasi yang diterima, baik dari sisi waktu, kedalaman materi, maupun kualitas penyampaian (Nirwana, 2024).

Pelatihan yang diberikan kepada guru sering kali bersifat teoritis dan tidak membumi pada konteks kelas yang mereka hadapi. Guru membutuhkan pelatihan yang praktis, kontekstual, dan berkelanjutan agar mereka dapat menerjemahkan kurikulum ke dalam strategi pembelajaran yang konkret. Namun, realitas menunjukkan bahwa pelatihan bersifat sporadis dan belum menyentuh seluruh wilayah, khususnya daerah-daerah terpencil (Saprun, 2025). Tidak sedikit guru yang mengaku masih bingung dalam merancang asesmen formatif, menyusun tujuan pembelajaran berbasis capaian kompetensi, atau menerapkan pembelajaran berbasis proyek sebagaimana diamanatkan dalam kurikulum baru. Minimnya pendampingan dan forum berbagi praktik baik membuat mereka bekerja sendiri dalam kebingungan. Akibatnya, banyak guru yang kembali ke pola pengajaran lama yang lebih mereka pahami.

Kesiapan guru tidak hanya menyangkut pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menyangkut motivasi dan dukungan moral. Banyak guru merasa bahwa perubahan kurikulum hanyalah rutinitas administratif semata, bukan sesuatu yang benar-benar memberikan perubahan bermakna. Kurangnya penghargaan terhadap upaya guru dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru turut menurunkan semangat mereka (Mulyasa, 2022). Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya sistem pelatihan guru yang menyeluruh dan sistematis. Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja sama menyediakan pelatihan berkelanjutan, menciptakan komunitas belajar guru, serta menghadirkan mentor-mentor yang kompeten di setiap jenjang. Dengan dukungan yang tepat, guru tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki keyakinan dan motivasi dalam mengimplementasikan kurikulum secara efektif.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan fondasi penting dalam mendukung implementasi kurikulum. Kurikulum baru yang mendorong pendekatan inovatif seperti pembelajaran digital, pembelajaran berbasis proyek, dan kolaboratif sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas pendukung. Namun, banyak sekolah di Indonesia, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), masih menghadapi kondisi yang sangat terbatas (Laana, 2025).

Keterbatasan tersebut meliputi infrastruktur dasar seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, hingga jaringan listrik dan internet. Misalnya, ketika kurikulum mendorong penggunaan teknologi digital, banyak sekolah di daerah terpencil yang bahkan belum memiliki komputer, proyektor, atau akses internet. Kondisi ini menyebabkan guru dan siswa kesulitan mengikuti arah pembelajaran yang ditetapkan oleh kurikulum nasional. Tidak hanya itu, bahan ajar dan buku teks sering kali belum tersedia secara merata. Sekolah-sekolah di wilayah terpencil harus menunggu lama untuk menerima distribusi buku, atau bahkan tidak menerimanya sama sekali. Hal ini membuat guru terpaksa menyusun materi sendiri tanpa pedoman yang jelas, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pembelajaran (Juro, 2025).



Keterbatasan sarana juga menghambat penerapan metode pembelajaran aktif dan kontekstual. Ruang kelas yang sempit dan tidak fleksibel menyulitkan guru untuk mengatur pembelajaran kelompok atau diskusi. Kegiatan pembelajaran luar ruang pun tidak bisa dilakukan karena tidak adanya fasilitas penunjang seperti taman belajar, laboratorium alam, atau peralatan praktik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan. Pengalokasian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) harus diarahkan secara lebih strategis agar dapat digunakan untuk pengadaan sarana dasar. Selain itu, perlu dikembangkan kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk mendukung pengembangan fasilitas pendidikan secara berkelanjutan.

3. Ketidaksesuaian antara Kurikulum dan Realita Sosial

Menurut Pahrudin, (2019) berpendapat bahwa Kurikulum nasional dirancang untuk menjadi panduan umum bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, kurikulum tersebut tidak selalu sesuai dengan realitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Perbedaan kondisi geografis, karakteristik budaya, serta kebutuhan lokal membuat implementasi kurikulum nasional menjadi kurang kontekstual di beberapa wilayah. Misalnya, materi pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh dari kehidupan urban atau berbasis teknologi tinggi sering kali sulit dipahami oleh siswa di pedesaan atau daerah terpencil. Kurikulum tidak sepenuhnya memperhatikan kearifan lokal atau konteks sosial yang khas, sehingga pembelajaran terasa jauh dari kehidupan nyata siswa. Ini menyebabkan siswa sulit mengaitkan pelajaran dengan pengalaman mereka sendiri.

Kesenjangan antara kurikulum dan realita ini juga dapat mengakibatkan rendahnya relevansi pendidikan. Siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari tidak memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka atau komunitasnya. Hal ini berpotensi menurunkan motivasi belajar dan membuat pendidikan kehilangan maknanya sebagai alat pemberdayaan masyarakat (Atmojo, et al. 2024). Selain itu, guru mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum yang terlalu abstrak atau normatif. Mereka perlu menyesuaikan materi dengan kondisi siswa agar pembelajaran lebih bermakna, tetapi tidak semua guru memiliki kapasitas atau keleluasaan untuk melakukan adaptasi kurikulum secara fleksibel. Terkadang, ketatnya pengawasan administrasi justru membatasi kreativitas guru dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual. Prinsip Kurikulum Merdeka, yang memberi kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, merupakan langkah awal yang positif. Namun, pelaksanaannya harus didukung dengan pelatihan dan kebijakan yang mendorong inovasi lokal serta penguatan identitas budaya setempat (Indriani, 2023)

4. Beban Administrati

Guru di Indonesia tidak hanya bertanggung jawab mengajar, tetapi juga dibebani oleh berbagai tugas administratif yang menyita waktu dan energi. Mulai dari pengisian dokumen RPP, laporan penilaian, pengelolaan data siswa, hingga pelaporan kegiatan sekolah, semua itu menyita perhatian guru dari tugas utamanya: mengajar dan membimbing siswa (Muktamar, et al. 2023).



Beban administratif ini semakin berat ketika implementasi kurikulum baru menuntut guru untuk mendokumentasikan berbagai aktivitas pembelajaran secara rinci. Alih-alih fokus pada perencanaan pembelajaran yang inovatif dan reflektif, guru justru lebih sibuk memastikan kelengkapan dokumen. Akibatnya, kualitas pembelajaran menjadi terabaikan. Situasi ini menciptakan tekanan psikologis bagi banyak guru. Mereka harus bekerja di luar jam mengajar untuk menyelesaikan laporan atau input data, bahkan sampai mengorbankan waktu pribadi dan keluarga. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan kelelahan emosional (*burnout*) dan menurunkan produktivitas serta motivasi mengajar. Lebih mengkhawatirkan, banyak tugas administratif tersebut bersifat repetitif dan kurang bermakna, karena tidak secara langsung mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Tugas tersebut lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi daripada membantu guru dalam refleksi dan pengembangan profesional (Sapa'at, 2012). Solusinya adalah dengan melakukan penyederhanaan sistem administrasi guru dan mendigitalisasi proses pelaporan secara efisien. Pemerintah perlu menciptakan sistem informasi pendidikan yang terintegrasi dan user-friendly, serta memperkuat peran tenaga administrasi sekolah agar guru dapat fokus pada tugas pembelajaran. Pendekatan ini sejalan dengan semangat kurikulum baru yang menempatkan guru sebagai fasilitator utama pembelajaran, bukan sebagai pekerja administratif.

D. Strategi Penguatan Implementasi Kurikulum

1) Peningkatan Kualitas Pelatihan Guru secara Berkelanjutan

Salah satu strategi utama dalam menguatkan implementasi kurikulum adalah dengan meningkatkan kualitas pelatihan guru secara berkelanjutan. Guru adalah pelaku utama dalam proses pendidikan; pemahaman mereka terhadap isi dan pendekatan kurikulum akan sangat menentukan efektivitas penerapannya.

Pelatihan guru seharusnya tidak hanya fokus pada aspek teoritis, tetapi juga pada praktik-praktik pembelajaran yang aplikatif dan kontekstual. Melalui pendekatan berbasis praktik baik (*best practices*), guru dapat belajar dari pengalaman nyata dan studi kasus yang sesuai dengan latar belakang mereka. Selain itu, pelatihan harus diarahkan untuk mengembangkan keterampilan pedagogi, teknologi, asesmen, serta kemampuan reflektif dan inovatif. Keberlanjutan pelatihan perlu didukung oleh pembentukan komunitas belajar guru seperti *Komunitas Belajar (Kombel)* atau *Professional Learning Community (PLC)*. Komunitas ini memungkinkan guru untuk saling berbagi pengalaman, berdiskusi, dan memecahkan masalah secara kolektif (Sari, et al. 2025).

2) Penyesuaian Kurikulum Berdasarkan Karakteristik Lokal dan Kebutuhan Peserta Didik

Kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan nyata peserta didik dan masyarakat di sekitarnya. Untuk itu, penyesuaian atau kontekstualisasi kurikulum menjadi langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi ruang fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan muatan lokal atau tema pembelajaran yang sesuai dengan budaya, kondisi sosial, serta potensi daerahnya.



Penyesuaian ini penting agar pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Siswa akan lebih mudah memahami materi jika disampaikan dengan contoh-contoh yang dekat dengan pengalaman sehari-hari mereka. Misalnya, dalam pelajaran sains atau IPS, guru dapat menggunakan fenomena lokal sebagai bahan kajian, seperti praktik pertanian setempat, adat istiadat, atau isu lingkungan di daerah tersebut. Selain dari aspek budaya, kebutuhan peserta didik juga harus menjadi pertimbangan utama. Kurikulum harus memberi ruang bagi keberagaman gaya belajar, minat, dan kemampuan siswa. Ini sejalan dengan prinsip pembelajaran diferensiasi, yang menjadi salah satu ciri dari Kurikulum Merdeka (Kadarwati, 2017)

Dengan demikian, setiap siswa dapat belajar sesuai dengan ritme dan potensinya masing-masing. Agar strategi ini berhasil, perlu ada dukungan kebijakan dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang memberi kewenangan lebih besar kepada satuan pendidikan untuk melakukan adaptasi kurikulum. Guru pun perlu dibekali dengan keterampilan dalam merancang pembelajaran yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

3) Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran secara Adaptif

Pemanfaatan teknologi tidak semata-mata berarti penggunaan perangkat digital di kelas, tetapi lebih pada bagaimana teknologi menjadi alat bantu yang mendukung proses belajar-mengajar agar lebih efektif, interaktif, dan fleksibel. Terlebih dalam situasi pascapandemi, keterampilan digital menjadi bagian penting dari kompetensi abad ke-21 yang harus dimiliki oleh guru dan siswa (Puspita, 2023). Penggunaan platform digital seperti Learning Management System (LMS), video pembelajaran, atau aplikasi interaktif dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Guru juga dapat menggunakan teknologi untuk merancang asesmen yang lebih bervariasi, seperti kuis daring, proyek kolaboratif, atau portofolio digital. Namun demikian, pemanfaatan teknologi harus mempertimbangkan akses dan kesiapan infrastruktur di setiap sekolah (Wibowo, 2023). Strategi pemanfaatan teknologi secara adaptif berarti guru mampu menyesuaikan alat dan pendekatan digital yang digunakan dengan kondisi nyata peserta didik dan sekolah. Di daerah yang belum terjangkau internet, pendekatan teknologi rendah (*low-tech*), seperti penggunaan video offline atau radio pendidikan, bisa menjadi solusi alternatif. Pendekatan ini penting agar transformasi digital dalam pendidikan tidak justru menciptakan kesenjangan baru. Dalam mendukung strategi ini, pemerintah dan mitra pendidikan perlu memastikan akses yang merata terhadap perangkat teknologi dan jaringan, serta memberikan pelatihan literasi digital kepada guru dan siswa.

4) Pelibatan Aktif Komunitas dan Orang Tua dalam Proses Pendidikan

Keterlibatan komunitas dan orang tua adalah kunci penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan melibatkan komunitas secara aktif, kurikulum dapat lebih hidup dan kontekstual, serta selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Orang tua dapat menjadi mitra strategis dalam proses pembelajaran, khususnya dalam mendukung perkembangan karakter dan kebiasaan belajar anak di rumah. Ketika orang tua memahami arah dan tujuan kurikulum, mereka akan lebih siap membantu anak belajar, memberikan motivasi, serta menciptakan lingkungan rumah yang kondusif bagi



kegiatan belajar. Untuk itu, komunikasi yang intensif antara sekolah dan orang tua perlu dibangun secara terbuka dan saling percaya (Natsir, 2018).

Selain itu, komunitas lokal juga dapat dilibatkan dalam proses pembelajaran melalui program kemitraan, narasumber, atau kegiatan berbasis proyek di lingkungan sekitar. Kegiatan seperti kunjungan ke tempat usaha lokal, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, atau pengabdian masyarakat oleh siswa, dapat menjadi sarana pembelajaran yang autentik dan bermakna. Ini sejalan dengan semangat *profil pelajar Pancasila* yang mendorong keterlibatan aktif siswa dalam masyarakat (Karwati, 2024). Dalam mewujudkan strategi ini, sekolah perlu memiliki perencanaan yang inklusif dan kolaboratif, di mana suara orang tua dan masyarakat turut diakomodasi dalam penyusunan program sekolah. Dengan memperkuat peran komunitas dan orang tua, pendidikan akan menjadi gerakan kolektif yang mampu menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan peserta didik dan lingkungan sekitarnya.

KESIMPULAN

Perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia mencerminkan semangat pembaruan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Namun, implementasinya memerlukan dukungan sistemik dan kesiapan aktor-aktor pendidikan. Kurikulum yang baik bukan hanya tentang isi, tetapi juga keberhasilan dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, guru, masyarakat, dan peserta didik sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ainissyifa, H., Nasrullah, Y. M., Fatonah, N., Indriani, S. A., Asyifiya, S. N., & Rohmah, A. (2024). *Manajemen Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka di Madrasah*. Cahaya Smart Nusantara.
- Amir, F., Sapari, S. H. I., & Amin, M. S. B. *Kurikulum dalam Lanskap Pendidikan: Konsep, Evolusi, dan Implementasi*. Penerbit Adab.
- Mahande, I. R. D. (2023). *Pengantar Pendidikan Kejuruan*. Indonesia Emas Group.
- Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen pendidikan karakter*. Bumi Aksara.
- Mustakim, B. (2011). *Pendidikan karakter: membangun delapan karakter emas menuju Indonesia bermartabat*. Samudra Biru.
- Pendidikan, B. S. N., & Indonesia, K. R. (2006). *Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: BNSP.
- Sapa'at, A. (2012). *Stop menjadi guru!*. Tangga Pustaka.
- Triwiyanto, T. (2022). *Manajemen kurikulum dan pembelajaran*. Bumi Aksara.



Zaeni, A., Sari, N. H. M., Syukron, A. A., Fahmy, A. F. R., Prabowo, D. S., Ali, F., & Faradhillah, N. (2023). *Kurikulum Merdeka pada pembelajaran di madrasah*. Penerbit NEM.

Jurnal

Alvizar, A. (2023). Pola Modern Organisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 4(2), 115-130.

Ani, Y. (2013). Penilaian autentik dalam kurikulum 2013. In *Seminar Nasional Implementasi Kurikulum* (pp. 742-749).

Anwar, S. S. (2021). *Kurikulum Pendidikan Islam Nonformal: (Aqidah, Ilmu al-Qur'an, Ilmu Hadits, Ushul Fiqih, Praktik Ushul Fiqih)*. Yayasan Do'a Para Wali

Anwas, O. M. A. O. M. (2013). Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi kurikulum 2013. *Jurnal Teknodik*, 493-504.

Atmojo, I. R. W., Adi, F. P., Ardiansyah, R., & Saputri, D. Y. (2024). *Pembelajaran Berdiferensiasi (Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka)*. CV Pajang Putra Wijaya.

Audi, A. A. P. J., Hamami, T., Gonibala, M. L., & Bonde, F. M. F. (2024). Perkembangan dan Problematika Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 10(4), 1648-1664.

Hanif, M. (2022). *Problematika Pembelajaran Daring Pada Mahasiswa Program Studi PAI PTI Al-Hilal Sigli* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Hartono, Y. (2017). Model pembelajaran nilai-nilai karakter bangsa di Indonesia dari masa ke masa. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7(01).

Indriani, N., & Suryani, I. (2023). Implementasi kurikulum merdeka belajar dalam pembentukan karakter disiplin peserta didik di sekolah dasar. *Khazanah Pendidikan*, 17(1), 242-252.

IZMI, A. (2017). *POLITIK KURIKULUM DI INDONESIA: Studi tentang Transisi Kurikulum 1964 ke Kurikulum 1968* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).

Juro, A. Z., Lubis, F. S. H., & Zahra, L. (2025). Dampak Infrastruktur Terhadap Pendidikan Di Perkampungan (Studi Kasus di Desa Sugarang Bayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 6957-6964.

Kaimuddin, K. (2015). Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8(1), 19-38.

Karwati, L., Herwina, W., Nurlaila, N., Yuliani, L., Novitasari, N., Hamdan, A., & Laksono, B. A. (2024). *Inovasi Program Pendidikan Masyarakat*. Bayfa Cendekia Indonesia.

Kristiawan, M. (2019). Analisis pengembangan kurikulum dan pembelajaran. *UPP FKIP Univ. Bengkulu (Issue February)*.



- Laana, D. L. (2025). Pendekatan Sistematis Dalam Administrasi Dan Manajemen Kurikulum Untuk Mencapai Pembelajaran Holistik. *Inculco Journal of Christian Education*, 5(1), 47-60.
- Meliza, M., Siraj, S., & Zahriyanti, Z. (2024). Implementasi manajemen Kurikulum Merdeka pada sekolah dasar di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP*, 5(2), 127-168.
- Mubarak, H. Z. (2022). *Desain kurikulum merdeka untuk era revolusi industri 4.0 dan society 5.0*. Zakimu. Com
- Muktamar, A., Iswahyudi, M. S., Salong, A., Wote, A. Y. V., Rahmatiyah, R., Riyadi, S., ... & Leuwol, F. S. (2023). *MANAJEMEN PENDIDIKAN: Konsep, Tantangan, dan Strategi di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Natsir, N. F., Aisyah, A., Hasbiyallah, H., & Ihsan, M. N. (2018). Mutu pendidikan: kerjasama guru dan orang tua. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 311-327.
- Nirwana, A. (2024). *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Negeri 4 Tangerang Selatan* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Pahrudin, A. (2019). *Buku: Pendekatan Saintifik Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Proses Dan Hasil Pembelajaran Pada Man Di Provinsi Lampung*.
- Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis masalah-masalah pendidikan dan tantangan pendidikan nasional. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 794-805.
- Pebriani, I., Affandi, L. H., & Astria, F. P. (2025). Analisis Kesiapan Guru untuk Melakukan Penilaian dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN 02 Jurit Kecamatan Pringgasea Lombok Timur. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 8(1), 362-380.
- Puspita, K. A., & Tirtoni, F. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 85-98.
- Praekanata, I. W. I., Virnayanthi, N. P. E. S., Juliangkary, E., & Ratnaya, I. G. (2024). *Menelusuri Arah Pendidikan: Dinamika dan Inovasi Kurikulum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rosa, E., Destian, R., Agustian, A., & Wahyudin, W. (2024). Inovasi Model dan Strategi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Inovasi Model dan Strategi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Journal of Education Research*, 5(3), 2608-2617.
- Saprun, S., Romelah, R., & Humaidi, M. N. (2025). Strategi Guru dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Muhammadiyah pada Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI*, 10(1), 46-55.
- Satria, I., Salamah, S., & Syaputra, E. (2021). MODEL INTEGRASI NILAI KEARIFAN LOKAL TABUT DALAM PEMBELAJARAN IPS DI SMP (Kombinasi Model PBL dan VCT).



- Sari, R. N., Wihardjo, E., Andriani, N., Tebai, N., Sariwardani, A., Rosadi, T., ... & Ratnasari, T. (2025). *Manajemen pendidikan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Sembiring, I. H. R. U., & Rohimah, I. (2021). *Membangun Karakter Berwawasan Kebangsaan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Viana, V. O., Safitri, E. D., Kartono, S. M. A. N., Permatasari, F. D., Widyanarko, R., & Egar, N. (2024). TRANSFORMASI TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM REFLEKSI KURIKULUM 1947, 1965, dan 1968. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(04), 302-311.
- Tohani, E. (2020). *Hubungan dialektis pendidikan dan pembangunan*. UNY Press.
- Wibowo, H. S. (2023). *Pengembangan Teknologi Media Pembelajaran: Merancang Pengalaman Pembelajaran yang Inovatif dan Efektif*. Tiram Media.
- Widyandini, M. W. (2021). *Implementasi Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Revisi dan Peningkatan Berpikir Tingkat Tinggi (Higher Order Thinking Skills) pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMAN 2 Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Yulianto, I. A. (2015). Analisa Pelaksanaan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Berorientasi KTSP di SMK N 2 Pengasih. *Jurnal Pendidikan Vokasional Teknik Mesin*, 3(2), 89-94.